



# *Paradigma*

**Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**REDAKTOR PELAKSANA**  
Didik Indrawanta

**WAKIL REDAKTUR PELAKSANA**  
Harmiyati

**PENYUNTING AHLI**  
Moctar Mas' oed (UGM)  
Purwo Santoso (UGM)  
Agus Dwiyanto (UGM)  
Ana Nadya Abrar (UGM)

**DEWAN PENYUNTING**  
Muh. Edy Susilo  
Sigit Haryono  
Anik Yuniarti

**BENDAHARA**  
Ida Wiendijarti

**SIRKULASI & DISTRIBUSI**  
Sugiarto  
Cristian Hernowo

**ALAMAT REDAKSI**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 485268, 486991  
Fax. (0274) 487147

Paradigma diterbitkan empat kali dalam satu tahun sebagai media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian sosial dan politik serta masalah-masalah yang menyangkut faktor penyebab, implikasi maupun analisis menyeluruh kebijakan baik disektor pemerintah maupun swasta

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku.

Redaksi berhak untuk menyunting isi naskah tanpa mengubah substansi

# *Paradigma*

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

## Daftar Isi

73 – 86

**Perbedaan Paradigma Pengungkapan Program *Corporate Social Responsibility*: Komparis Atas Perusahaan-Perusahaan Di Amerika Dan Eropa**

*Sri Suryaningsum*

87 – 94

**Alasan Perusahaan Tidak Menurun Tingkat Upah Minimal**

*Joko Susanto*

95 – 105

**Strategi Peningkatan Jiwa Kewirusahaan**

*Human Santosa Utomo*

106 – 116

**Pengaruh *Free Cash Flow*, *Leverage* Dan *Invesment Opportunity Aset* Terhadap *Earning Management***

**(Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)**

Sutoyo

Suslina

117 – 124

**Modal Intelektual Sebagai Aset Organisasi Dalam Meraih Kesuksesan**

*Meilan Sugiarto*

*Hani Subagyo*

124 – 136

**Pengukuran Citra Perguruan Tinggi**

**(Studi Komparatif Citra Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Yogyakarta Menurut Siswa Sma Di Kota Yogyakarta)**

*Sigit Haryono*

*Ida Susi Dewanti*

# PERBEDAAN PARADIGMA PENGUNGKAPAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: KOMPARASI ATAS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI AMERIKA DAN EROPA

Sri Suryaningsum

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK Lingkar Utara, Condong Catur, Yogyakarta

Email : suryaningsumsri@yahoo.com

## **Abstract**

*Corporate Social Responsibility (CSR) programs are becoming increasingly popular elements of corporate reporting strategies. In order for CSR programs as a new paradigm for doing business to accomplish these goals, companies design their CSR programs in a variety of ways in any countries. That national differences in CSR can be explained by historically grown institutional frameworks that shape national accounting systems. The differences in CSR announcement cause explicit CSR or implicit CSR. For many U.S. corporations initiatives to insure the uninsured are fundamental to their CSR and CSR has explicitly addressed such issues as fair wages, working time, and conditions, health care, redundancy, and protection against unfair dismissal. But in European CSR reflects these countries' institutional frameworks and NBSs-in particular, formal, mandatory, and codified rules or laws defining the responsibility of corporations and other governmental and societal actors for particular social issues, which we call implicit CSR.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility, national accounting systems, institutional framework, explicit CSR, implicit CSR*

## **Pendahuluan**

Perbedaan penyampaian pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* dipengaruhi aturan hukum, budaya, pendidikan, kultural, sistem keuangan, dan politik suatu negara. Adanya berbagai penyebab tersebut mengakibatkan program CSR disampaikan secara eksplisit ataupun implisit, oleh karena itu harus hati-hati dalam menyimpulkan atau menjustifikasi suatu program CSR. Penyimpulan yang salah biasanya terjadi kalau tidak mengetahui atau memahami latar belakang aliran pendekatan yang dianut oleh suatu perusahaan. Karya ilmiah ini dimotivasi untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan program CSR ditinjau dari pendekatan Amerika dan Eropa.

Perkembangan CSR secara bertahap terjadi mengikuti perkembangan kesadaran akan pentingnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala internal dan eksternal perusahaan. Perkembangan jenis pelaporan adalah sebagai berikut: *Corporate Social Responsibility* mulai banyak dilakukan pada akhir 1990an, pelaporan lingkungan pada pertengahan 1990an, aspek-aspek keuangan sesuai dengan tatakelola perusahaan (*good corporate governance*), sedangkan akuntansi keuangan dan pelaporan sudah dilakukan sejak dari 1850-an. Perkembangan tipe pelaporan adalah sebagai berikut:



Tipe Pelaporan	Waktu
Akuntansi keuangan dan pelaporan	dari 1850an
Aspek-aspek keuangan taakelola perusahaan ( <i>corporate governance</i> )	1990an
Pelaporan lingkungan	akhir 1990an
Akuntansi sosial dan pelaporan Sustainability reporting (pelaporan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomik yang lebih luas)	dari 2000an

Darwin (2004) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dan lain-lain.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

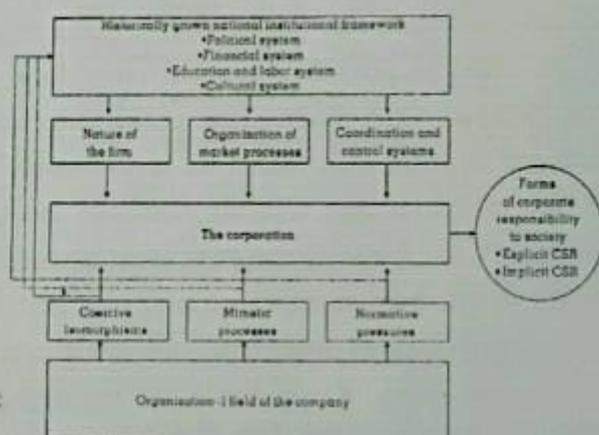
Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok

sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya [Belkaoui (2000) dalam Komar (2004)].

Dalam praktiknya ternyata setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari pendekatan politik, budaya, aturan hukum, pendidikan, dan sistem keuangan yang ada pada Negara tersebut. Organisasi artikel ini adalah pembahasan mengenai format penyajian CSR (eksplisit atau implisit), CSR dan pemilihan prosedur akuntansi, dan simpulan.

### FORMAT PENYAJIAN CSR (EXPLISIT ATAU IMPLISIT)

Pada format penyajian *Corporate Social Responsibility* di berbagai negara terjadi perbedaan, misalnya negara yang banyak dipengaruhi oleh akuntansi model Amerika akan menyajikan CSR dalam format eksplisit, sedangkan negara yang banyak dipengaruhi oleh model Eropa maka akan menyajikan CSR dalam format yang implisit. Dalam hal ini Matten & Moon (2008) membuat bagan sebagai berikut:



Matten & Moon (2008) menjelaskan dalam perusahaan-perusahaan Amerika sudah biasa dan sudah merupakan keharusan agar menyajikan se-

cara eksplisit format penyajian CSRnya, misalnya berapa uang yang diterima pegawainya, jaminan kesejahteraan apa saja yang sudah diberikan perusahaan kepada pegawainya misalnya berapa asuransi kesehatan yang diterimakan kepada pegawainya, berapa hari cuti yang biasanya diterimakan kepada pegawainya, fasilitas rekreasi apa yang diterimakan kepada pegawainya. Namun hal ini akan sangat berbeda jika misalnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Jerman karena format penyajian CSRnya adalah implisit, dalam hal ini tidak akan ditemukan uraian berapa gaji dan jaminan kesehatan, fasilitas kesejahteraan apa saja yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Bukan berarti perusahaan-perusahaan Jerman tersebut tidak pernah memberikan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan CSR, hal ini karena secara hukum, semua fasilitas program-program CSR sudah harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga memang budaya perusahaan-perusahaan Jerman tidak mengungkapkan program CSR secara eksplisit, inilah yang disebut bahwa program CSR sebenarnya sudah dilakukan tetapi pengungkapannya tidak sejelas dan serinci pada perusahaan-perusahaan dengan model Amerika. Jadi untuk menjustifikasi keberadaan CSR berdasarkan format penyajian harus hati-hati, karena salah-salah apa yang dijustifikasi tersebut keliru, untuk menjustifikasi keberadaan CSR berdasarkan format penyajian harus memperhatikan semua aspek yang berlaku pada Negara tersebut. Kondisi ini sebenarnya juga berlaku untuk format penyajian CSR antar sektor industri, ataupun untuk menjustifikasi penerapan CSR per perusahaan.

Dalam sudut pandang komparasi akuntansi antar negara Iqbal, Melcher, dan Elmallah (1997), mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara

yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitan-kesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk memberikan informasi finansial berkaitan dengan perusahaannya, ada kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi finansial tersebut.

Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Christopher Nobes dan Robert Parker (1995), menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) sistem hukum, (2) pemilik dana, (3) pengaruh system perpajakan, dan (4) kemantapan profesi akuntan, (5) inflasi, (6) teori akuntansi dan (7) *accidents of history*.

#### a. Sistem hukum

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara sep-

berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut sistem hukum yang digolongkan dalam *codified Roman law*. Dalam *codified law*, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem *common law*. Dalam *common law*, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.

#### b. Sumber pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (*shareholder*). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh *shareholders* namun para *shareholders* ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (*disclosure*), pemeriksaan (*audit*) dan informasi yang tidak bias (*fair information*).

#### c. Sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (*accounting measurement*). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturanaturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial pe-

rusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.

#### d. Profesi akuntan

Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.

#### e. Inflasi

Di negara-negara dengan tingkat inflasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode *general price level adjustment* menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan *historical cost*.

#### f. Teori Akuntansi

Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan *judgment* untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan *replacem ent cost*

akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya *conceptual framework*.

#### g. *Accidents of History*

Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (*disclosure*) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.

Sedangkan Radebaugh dan Gray (1997:47) menyebutkan sedikitnya ada empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan-aturan akuntansi.

Lebih rinci, Radebaugh dan Gray (1997), menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut:

#### a. Sifat kepemilikan perusahaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki public dibandingkan dengan pada pe-

rusahaan keluarga.

#### b. Aktivitas usaha

Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.

#### c. Sumber pendanaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana keluarga.

#### d. Sistem perpajakan

Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan untuk pemegang saham.

#### e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan

Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.

#### f. Pendidikan dan riset akuntansi

Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.

akuntansi yang bermutu.

**g. Sistem politik**

Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (*central planning*) atau swastanisasi (*private enterprises*).

**h. Iklim sosial**

Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.

**i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan**

Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan

aktiva tak berwujud seperti merek, *goodwill* dan sumber daya manusia.

**j. Tingkat inflasi**

Timbulnya *hyperinflation* di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan *historical cost*.

**k. Sistem perundang-undangan**

Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan *civil codes*, aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan *common law*.

**l. Aturan-aturan akuntansi**

Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan seperti di Inggris dan Amerika Serikat.

**CSR DAN PEMILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan sekedar kegiatan ekonomi, yaitu menciptakan laba demi kelangsungan usaha, melainkan juga tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Dasar pikirnya adalah bahwa menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (Djatnika, 2006). Belkaoui (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba

gurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial). Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high-profile dibandingkan dengan industri yang low-profile.

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat *leverage* yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan. Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal

yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) yang merupakan bagian dari pelaporan sustainabilitas didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya Belkaoui dan Karpik (1989), Komar (2004).

Dalam hal hubungan pengaruh perspektif lingkungan dan informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan fenomena Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama

untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Grey et al. 1995 mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi antarwaktu dan antarnegara, hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing negara. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Temuan-temuan penelitian mengenai hubungan kinerja keuangan dengan lingkungan belum konsisten berkaitan dengan signifikan tidaknya hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Selain itu, semakin meningkatnya kepedulian pemerintah Indonesia dalam hal pengungkapan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia maka perlu dilakukan penelitian pendekatan lingkungan dan faktor faktor yang mempengaruhi informasi pelaporan sustainability. Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis

pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif. Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan. Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch (2005) menunjukkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Belkaoui dan Karpik (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya

(termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat. Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang *high-profile* dibandingkan dengan industri yang *low-profile*.

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat *leverage*/ungkitan yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan

pengawasan. Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah Scott (1997). Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dsb.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low-profile*. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang *high-profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri

oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*. Sedangkan Dlekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang *high-profile*. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian tersebut kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri yang *high-profile*.

## SIMPULAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dilandasi pemikiran bahwa keberadaan perusahaan tidak lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil perusahaan berdampak nyata terhadap kualitas kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan sekedar kegiatan ekonomi, yaitu menciptakan laba demi kelangsungan usaha, melainkan juga tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Dasar pikirnya adalah bahwa menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (Djarmiko, 2006).

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) yang merupakan bagian dari pelaporan sustainabilitas didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis

mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya Belkaoui dan Karpik (1989).

Untuk menjustifikasi keberadaan CSR berdasarkan format penyajian harus memperhatikan semua aspek yang berlaku pada suatu negara jika ingin membandingkan penerapan CSR antar Negara, demikian juga berlaku untuk format penyajian CSR antar sektor industri, ataupun untuk menjustifikasi penerapan CSR per perusahaan. Untuk perusahaan-perusahaan Amerika sudah biasa dan sudah merupakan keharusan agar menyajikan secara eksplisit format penyajian CSRnya, misalnya berapa uang yang diterima pegawainya, jaminan kesejahteraan apa saja yang sudah diberikan perusahaan kepada pegawainya misalnya berapa asuransi kesehatan yang diterimakan kepada pegawainya, berapa hari cuti yang biasanya diterimakan kepada pegawainya, fasilitas rekreasi apa yang diterimakan kepada pegawainya. Namun hal ini akan sangat berbeda jika misalnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Jerman karena format penyajian CSR-nya adalah implisit, dalam hal ini tidak akan ditemukan uraian berapa gaji dan jaminan kesehatan, fasilitas kesejahteraan apa saja yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Bukan berarti perusahaan-perusahaan Jerman tersebut tidak pernah memberikan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan CSR, hal ini karena secara hukum, semua fasilitas program-program CSR sudah harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga memang budaya perusahaan-perusahaan Jerman tidak men-

gungkapkan program CSR secara eksplisit, inilah yang disebut bahwa program CSR sebenarnya sudah dilakukan tetapi pengungkapannya tidak sejelas dan serinci pada perusahaan-perusahaan dengan model Amerika. Jadi untuk menjustifikasi keberadaan CSR berdasarkan format penyajian harus hati-hati, karena salah-salah apa yang dijustifikasi tersebut keliru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Symposium Nasional Akuntansi 9*.
- Al-Tuwaijri, S.A., Christensen, T.E. dan Hughes II, K.E., 2004. The Relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 29. pp.447-471.
- Beets, S. Douglas and Christopher C. Souther. 1999. Corporate Environmental Reprints: The Need for Standards and an Environmental Assurance Service. *Accounting Horizons*. Vol 13, No. 2, p. 129-145.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No. 1, p. 36- 51
- Bragdon, J. dan Marlin, J. 1972. Is pollution profitable? *Risk Management*. Vol. 19. pp.9-18.
- Brahman, M.R. 2002. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Keuangan. *Media Akuntansi*. Edisi 27/ Juli -Agustus, hal 49-50.
- Burritt, Roger L and Stephen Welch. 1997. Accountability for Environmental Performance of the Australian Commonwealth Public Sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 532-562.
- Darsono, Suratno, B.I., dan Mutmainah, S., 2006. Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance. *Symposium Nasional Akuntansi 9*, Padang.
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Deegan, Craig and Michaela Rankin. 1997. The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Reports. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 562-584.
- Eipstein, Marc J. and Martin, Freedman. 1994. Sosial Disclosure and the Individual Investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 7, No. 4, p. 94-108
- Ema. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Financial Accounting Standards Board, 1975. Statement of Financial Accounting Standards No. 5 Accounting for Contingencies. <http://www.fasb.org/pdf/fas5.pdf>
- Finch, Nigel. 2005. The Motivations for Adopting Sustainability Disclosure. Macquarie Graduate School of Management. *Social Science Research Network*.

- Freedman, M. dan Jaggi, B. 1982. Pollution Disclosure, Pollution Performance dan Economic Performance. *Omega*. Vol. 10. pp.167-176
- Freedman, M. dan Jaggi, B. 1992. An Investigation of The Long-Run Relationship Between Pollution Performance and Economic Performance: the Case of Pulp-and-Paper Firms. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 3(4). pp.315-336.
- Freedman, M. dan Wasley, C. 1990. The Association Between Environmental Performance and Environmental Disclosure in Annual Reports and 10-Ks. *Advances in Public Interest Accounting*. Vol. 3, pp.183-193.
- Gallhöver, Sonja and Jim Haslam. 1997. The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflections. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 2, p. 148-174.
- Gray, R., Bebbington, J. dan Walters, D. 1993. *Accounting for the Environment*. Hongkong. ACCA
- Gray, Rob; Colin Dey; Dave Owen; Richard Evans and Simon Zadek. 1997. Struggling with the Praxis of Social Accounting: Stakeholders, Accountability, Audits and Procedures. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 3, p. 325-364.
- Gray, Rob; Dave Owen and Keith Maunders. 1988. Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 1, No. 1, p. 6- 20
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, p. 77-108
- Handen, Febryanto. 2005. Perusahaan-perusahaan Peduli Lingkungan KADO untuk Bumi. *Warta Ekonomi*. hal 28-32.
- Hill, Charles W.L. and Thomas M. Jones. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Journal of Management Studies*. Vol. 29, No. 2, p. 131-154.
- Hughes II, K.E. 2000. The Value Relevance of NonFinancial Measures of Air Pollution in the Electric Utility Industry. *The Accounting Review*. Vol. 75, No. 2, p. 209-228.
- Hughes, S.B., Anderson, A. dan Golden, S., 2001. Corporate Environmental Disclosures: Are They Useful in Determining Environmental Performance. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 3(20). pp.217-240.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empan Patria. Jakarta.
- Ingram, R. dan Frazier, K. 1980. Environmental Performance and Corporate Disclosure. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. pp.612-622.
- Iqbal, M. Zafar, Trini U. Melcher dan Amin E. Elmallah (1997), *International Accounting: A Global Perspective*, Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing
- Jensen, M.C. and Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs,

- dan Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3, p. 305-360.
- Jorgensen, Bjorn N. and Michael T. Kischenheit. 2003. Discretionary Risk Disclosure. *The Accounting Review*. Vol. 78, No. 2, p. 449-469.
- Joshi, Satish; Ranjani Krishnan, and Lester Lave. 2001. Estimating the Hidden Cost of Environmental Regulation. *The Accounting Review*. Vo. 76, No. 2, Aapril, p. 171-198.
- Komar, Seful. 2004. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58.
- Lehman, Glen. 1999. Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. *Accounting, organizations and Society*. Vol. 24, p. 217-241
- Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 521-547
- Li, Y., Richardson, G. dan Thornton, D. 1997. Corporate Disclosure of Environmental Liability Information: Theory and Evidence. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 14(3). pp.435-474.
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behaviour. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62.
- Matten, Dirk. Moon, Jeremy. 2008. Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework for A Comparative Understanding of CSR. *Academy of Management Review*.
- Mathews, M.R. 1997. Twenty-Five Years of Social and Environmental Accounting Research: Is there a Silver Jubilee to Celebrate? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 481-531.
- Media Akuntansi. 2005. Sustainability Reporting: Arti pentingnya bagi perusahaan dan bagaimana peran akuntan. Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005
- Nobes, Christoper dan Robert Parker (1995), *Comparative International Accounting*, Edisi keempat, London: Prentice Hall International (UK) Limited
- Narver, J. 1971. Rational Management Responses to External Effect. *Academy of Management Journal*. March. pp.99-115.
- Nurgiyantoro, Burhan dkk, 2004, *Statistik Terapan Untuk Penel. an Ilmu-Ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Owen, David. 2005. CSR After Enron: A Role for the Academic Accounting Profession? Working Paper. *Sosial Science Research Network*.
- Patten, D.M. 2002. The Relation Between Environmental Performance and Environmental Disclosure: a Research Note. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 27. pp.763-773.
- Porter, M. dan van der Linde, C. 1995. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 9(4). pp.97-118.
- Radebaugh, Lee H., dan Sidney J. Gray (1997), *International Accounting and Multinational Enterprises*, Edisi keempat, Toronto, Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Republika. 2004. Sembilan BUMN Raih Peringkat Hitam Proper Lingkungan. 28 Desember
- Rockness, J. 1985. An Assessment of the Relationship Between U.S. Corporate Environmental Performance and Disclosure. *Journal of Environmental Accounting and Auditing*. Vol. 6, No. 1, p. 1-10.

- nal of Business Finance and Accounting*. Vol.12. pp.339-354.
- Rockness, J., Schlachter, P. dan Rockness, H. 1986. Hazardous Waste Disposal, Corporate Disclosure and Financial Performance in the Chemical Industry. *Advances in Public Interest Accounting*. Vol. 1. pp.167-191.
- Sayekti, Yosefa. Wondabio, Ludovicus Sensi. 2007. Pengaruh Csr Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta). *SNA 10 Makasar*.
- Sarumpaet, Susi. The Relationship between Environmental Performance and Financial Performance amongst Indonesian Companies. *Journals of Accounting Research*. 2005: Universitas Kristen Petra, [www.petra.ac.id](http://www.petra.ac.id)
- Spicer, B. 1978. Investors, Corporate Social Performance and Information Disclosure: an Empirical Study. *The Accounting Review*. Vol. 53. pp.94-111.
- Suharto, Harry. 2004. Standar Akuntansi Lingkungan: Kebutuhan Mendesak. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 4-5.
- Tempo Interaktif. 2005. Penilaian KLH pengaruhi kualitas kredit perusahaan, 08 April.
- The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 2004. An Introduction to Sustainability Reporting for Organisations in Indonesia.
- Uno, Kimio and Peter Bartelmus. 1998. *Environmental Accounting in Theory and Practice*. New Jersey: Kluwer Academic Publishers.
- Verrecchia, R. 1983. Discretionary Disclosure. *Journal of Accounting and Economics*. Vol.5(3). pp.179-194.
- Wiseman, J. 1982. An Evaluation of Environmental Disclosure Made In Corporate Annual Reports. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 7(1). pp.53-63.
- Zeghal, Daniel and Sadrudin A. Ahmed. 1990. Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 3, No. 1, p. 38-53